

Relasi Negara, Ideologi, Masyarakat dan Pendidikan Islam

Luluk Ernawati

Mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: lu2k.3r@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki beragam etnis, agama, suku dan tradisi yang memiliki tantangan dalam pendidikan Islam. Kondisi masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh ideologi yang diadopsi yang akan menentukan arah kebijakan pendidikan Islam atau politik pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa antara negara, ideologi, masyarakat dan pendidikan Islam adalah sinergi yang dinamis, suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam membangun peradaban yang dicita-citakan dan mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman dan takwa kepada Allah SWT, serta karakter yang mulia, memiliki kemampuan menjaga kedamaian dan keharmonisan hubungan antar dan antaragama, pengembangan siswa dalam memahami, hidup dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dengan menyelaraskannya dalam sains, teknologi, dan seni.

Kata Kunci : *negara, ideologi, masyarakat, pendidikan Islam*

Pendahuluan

Berbicara masalah pendidikan, banyak definisi yang diungkapkan. Secara umum, bisa dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia dalam arti upaya mengembangkan potensi manusia untuk menuju manusia seutuhnya, baik itu potensi jasmani maupun rohani. Potensi jasmani manusia adalah seluruh potensi yang memiliki wujud nyata yang terdiri atas indra manusia dan lainnya. Sedangkan potensi rohani adalah seluruh kelengkapan dimensi manusia yang tak berwujud nyata berupa bentuk spiritual. Potensi-potensi manusia ini semuanya tidak mungkin berkembang tanpa lewat proses pendidikan.¹

Sedangkan pendidikan dalam arti Islam sebagaimana menurut pendapat Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas sebagaimana yang ditulis oleh Toto Suharto dalam bukunya adalah sesuatu yang khusus hanya untuk manusia. Dan disebutkan pula oleh Marimba bahwa manusia yang dikehendaki oleh pendidikan Islam adalah manusia yang memiliki kepribadian Muslim.²

Charlene Hwee Phio Tan dalam bukunya yang berjudul *Islamic Education and Indoctrination The Case in Indonesia* menyebutkan bahwa

¹ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 196.

² Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 85.

“Islamic education as any form of teaching and learning that is based on the principles and values of Islam. It follows from our interpretation of Islam as a cultural system that there are diverse approaches to religious teaching and learning for the different social groupings among Muslims.”³

Dari pendapat diatas penulis memiliki pandangan bahwa pendidikan Islam adalah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam sistem budaya masyarakat Muslim yang beragam maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda pula. Dengan demikian tugas dan tujuan pendidikan Islam diharapkan dapat tercapai.

Adapun tugas pendidikan secara umum menurut H.M. Arifin adalah “membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan proses perkembangan manusia dari tahap demi tahap kehidupan anak didik sampai mencapai titik kemampuan yang optimal”.⁴ Tugas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 20/2003 yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵

Dalam menghadapi tantangan pertumbuhan dan perkembangan IPTEK, persaingan global maka pembangunan nasional sangat penting memfokuskan pada peningkatan kualitas SDM. Hal ini secara otomatis dikatakan bahwa lembaga pendidikan Islam juga mempunyai tantangan yang cukup besar dalam meningkatkan mutu pendidikan.⁶

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan maka perlunya pendidikan diselenggarakan dengan sadar, terencana yang matang dan negara mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan pendidikan agar bisa berlangsung sesuai dengan lintasan yang benar.⁷

Isu mengenai hubungan antara agama dan negara memang telah terjadi sejak lama dan menjadi bahan diskusi serta perdebatan yang cukup sengit, yakni Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang memuat subsistem pendidikan agama mulai lahirnya UU No 4 tahun 1950 hingga UU No 20 tahun 2003.⁸ Namun demikian kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam terlihat cenderung semakin positif yakni dari domestika ke arah akomodasi.⁹

³ Charlene Hwee Phio Tan, *Education and Indoctrination The Case in Indonesia*, (New York: Routledge, 2011),4. Terjemahan versi Indonesia :

“Pendidikan Islam sebagai bentuk pembelajaran yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini mengikuti dari penafsiran kita tentang Islam sebagai sistem budaya yang ada beragam pendekatan untuk mengajar agama dan belajar untuk kelompok sosial yang berbeda di kalangan umat Islam.”

⁴ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rosdakarya, 2000), 33.

⁵ UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 Bab II

⁶ Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 190.

⁷ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 110.

⁸ Sutrisno, Muhyidin Albarobis, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 42.

⁹ Mujianto Solichin, M. Kholid Thohiri, dkk, *Politik Pendidikan Islam*, (Malang: Media Sutra Atiga, 2016), 174.

Indonesia yang merupakan negara dengan beragam suku bangsa, agama, ras dan tradisi mempunyai tantangan yang cukup besar dalam pendidikan Islam. Untuk itu perlu kiranya memperhatikan pendidikan Islam yang berbasis masyarakat, sebab masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa orang yang hidup di dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan bersama, dan terikat dengan sistem, nilai, ajaran, hukum dan tradisi lainnya. Perkembangan manusia dari agraris kepada industrialis dan informasi juga berpengaruh terhadap pendidikan.¹⁰

Dari lika-liku pendidikan di Indonesia dengan masyarakat yang heterogen dan tentunya memiliki ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara maka sangat menarik untuk membahas bagaimana relasi antara negara, ideologi, masyarakat dan pendidikan Islam. Untuk itu paper ini akan membahas bagaimana relasi antara negara, ideologi, masyarakat dan pendidikan Islam. Sebagai perbandingan penulis memilih negara Malaysia yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Indonesia.

Metodologi

Untuk mempertajam kajian dalam artikel ini, penulis menggunakan studi komparatif, yang membandingkan konsep, ideology dan praktik pendidikan Islam yang berkembang di dua Negara. Studi komparatif merupakan metode yang dipakai untuk mendapatkan perbandingan dua hal yang memiliki kesamaan ciri dan karakter untuk dapat menemukan kekhasan dalam satu permasalahan, dalam hal ini penulis hendak membandingkan relasi ideology, Negara dan pendidikan Islam di dua Negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Kedua Negara ini memiliki kesamaan dalam penduduk mayoritas muslim, namun memiliki ideologi Negara yang berbeda, sehingga menarik untuk dikaji.

Sementara analisis dalam artikel ini menggunakan analisis induktif, di mana penulis menelaah konsep ideology masing-masing Negara, kemudian menganalisis implementasinya dalam kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam di Indonesia

1. Wilayah, Kondisi Masyarakat dan Ideologi Negara Indonesia

Wilayah Indonesia berada di antara dua benua, Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi geografis Indonesia sangat strategis dan sangat penting dari segi perekonomian. Indonesia berada pada simpang perlintasan lalu lintas dunia.

Menurut data sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21 persen).Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni

¹⁰Abudin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) ,162.

oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.¹¹

Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.

Pemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,91% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha dan 0,05% Khonghucu.

Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.

Ada lebih dari 300 kelompok etnik di Indonesia. Suku Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, Bugis, Meayu, Banten, Banjar, Aceh, Bali, Sasak, Dayak, Tionghoa, Makasar, Cirebon, Gorontalo, Minahasa, dsb. Tiga populasi terbesar adalah Suku Jawa 40,22 %, Sunda 15,5 %, dan Batak 3,58%.

Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam Negara Pancasila, agama dapat menyediakan basis moral dan spiritual dalam kehidupan negara dan masyarakat seperti dalam sistem hukum dan budaya politik. Negara dapat menggunakan perspektif agama dalam batas-batas otoritas fungsional seperti menyediakan pelayanan keagamaan, pendidikan agama, dan mencegah tingkah laku politik dan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Di Indonesia segala macam urusan agama ditangani oleh Kementerian Agama yang membawahi seluruh agama yang ada di Indonesia, karena semua agama memiliki kedudukan yang sama. Hak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut warga diatur dan dilindungi oleh UUD. Kecuali karena sebab mayoritas, tidak ada agama yang memiliki kedudukan istimewa di Indonesia

¹¹www.bps.go.id, diakses tanggal 16 Nopember 2017, 02.30 WIB

2. Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Awal dari pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Masjid merupakan tempat pertama sebagai lembaga pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya muncullah pesantren, dayah, surau, dan lain sebagainya.¹²

Dalam dinamika pendidikan Islam di Indonesia, ada tiga lembaga yang terbentuk pada awal abad kedua puluh. Yakni Pesantren, Sekolah dan Madrasah. Pesantren telah mengalami perkembangan mulai pesantren tradisional hingga pesantren modern. Sekolah sejak dari tidak diajarkannya pelajaran agama pada zaman kolonial Belanda sampai dimasukkannya pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dan swasta setelah Indonesia merdeka. Madrasah yang pada mulanya penekanannya dalam bidang ilmu-ilmu agama dan hanya berkiprah di lingkungan Departemen Agama saja, sampai kepada ditetapkannya madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, yang kedudukannya sama dengan sekolah.¹³

Demikian pula pendidikan Islam pada tingkat pendidikan tinggi. Pada zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an telah muncul hasrat dan cita-cita umat Islam di Indonesia untuk mendirikan Perguruan Tinggi.¹⁴ Hingga kemudian pada saat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta setelah menggabungkan dua lembaga pendidikan tinggi Islam saat itu yakni PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang berada di Yogyakarta dengan ADIA (Akademik Dinas Ilmu Agama) yang berkedudukan di Jakarta. Setelah diresmikan IAIN di Yogyakarta, secara bertahap berkembanglah IAIN di seluruh Indonesia.¹⁵

Secara historis, perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia hingga sekarang dapat dibagi menjadi tiga macam :

1. Lembaga pendidikan tinggi Islam negeri, yakni IAIN dan STAIN.
2. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk universitas. Di lembaga ini dikembangkan berbagai fakultas, jurusan serta program studi yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan salah satu di antara fakultas yang dikembangkan adalah Fakultas Agama Islam.
3. Lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk institut atau sekolah tinggi.¹⁶

3. Tujuan dan Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru

Sesuai pasal 3 UU No. 20/2003 disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa

¹²Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 145.

¹³Ibid, 147.

¹⁴Ibid, 135.

¹⁵Ibid, 117.

¹⁶Ibid, 137.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁷

Adapun Produk kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru, meliputi :

1. UUD 1945 (Amandemen)
2. Pancasila
3. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
7. Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah
8. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
9. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru
11. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
12. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 27 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

¹⁷ UU No 20 Th 2003 Pasal 3 Bab II

Pendidikan Islam di Malaysia

1. Wilayah, Kondisi Masyarakat dan Ideologi Negara Malaysia

Sebagaimana dalam buku yang berjudul *Studi Islam di Asia Tenggara* disebutkan bahwa :

Malaysia terletak di Semenanjung Malaka Asia Tenggara dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas wilayah berada 1.036 km² menyeberangi Laut Cina Selatan tepatnya di utara Pulau Kalimantan dan lainnya ada di Pulau Penang. Kota-kota lainnya adalah Penang, Ipoh, Malaka, Johor Baru, Shah Alam, Klangtan, Kucing, Kota Kinabalu, Kota Baru, Kuala Trengganu, Petaling Jaya.¹⁸

Disebutkan pula oleh Asep Ahmad Hidayat, dkk yang dikutip dari *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic* bahwa:

Pada tahun 2012 jumlah penduduk Malaysia berkisar 29.179.952, sedangkan agama mayoritas Islam (53%), Buddha (17%), Kong Hu Chu, Tao, Chinese (11%), Kristen (8,6%), dan Hindu (7%). Sejalan dengan waktu perkembangan jumlah penduduk dan penganut agama semakin meningkat dengan rata-rata 2,0%. Kelompok etnis terdiri atas Melayu 53%, Cina 26%, Asia 11,8%, India 7,7%, dan lainnya 1,2%.¹⁹

Etnis Melayu merupakan bagian terbesar dari populasi Malaysia, mereka menguasai kehidupan politik, sedangkan bidang ekonomi dan bisnis dikuasai oleh etnis Cina, di sisi lain etnis Tamil menempati sektor non formal dalam perekonomian Malaysia.

Persatuan Nasional merupakan tujuan utama dari Malaysia dalam perumusan kebijakan sosio-ekonomis. Ideologi nasional yakni **Rukun negarasebagai** dasar untuk menggalang persatuan/kesatuan nasional. Kepala negara Malaysia adalah Yang Dipertuan Agong, jabatan raja yang dipilih setiap lima tahun sekali di Malaysia, yang menjabat dan berhak dipilih sebagai raja itu adalah para sultan di 13 negara bagian. Perannya sebagai kepala negara lebih bersifat keupacaraan, walaupun ia juga menjabat pimpinan angkatan bersenjata dan lembaga hukum.

Di Malaysia, urusan agama Islam langsung di bawah pengawasan Yang Dipertuan Agong, dalam hal ini ditunjuk seorang pejabat Urusan Hal Ehwal Agama Islam sebagai pelaksananya. Hal ini merupakan suatu keistimewaan bagi Agama Islam, sebab urusan keagamaan Islam merupakan urusan negara. Oleh sebab itu negara sangat ketat mengawal segala kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai Islam. Tetapi sebaliknya, agama-agama selain Islam bukan urusan negara.

¹⁸Asep Ahmad Hidayat, dkk, *Studi Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 31.

¹⁹Ibid, 32.

Berdasarkan konstitusi kerajaan Malaysia, posisi seorang raja diganti setiap lima tahun. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.²⁰

Malaysia telah mengalami enam kali pergantian pemimpin sejak pertama merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Dimulai dari Perdana Menteri yang pertama yaitu Tengku Abdul Rahman (1957-1970), Tun Abdul Razak (1970-1976), Datuk Husen Onn (1976-1981), Dr. Mahathir Mohammad (1981-2005), dan Abdullah Badawi (2005-2009). Pada akhir Maret 2009, Abdullah Badawi mengundurkan diri sebagai perdana menteri karena krisis keuangan nasional Malaysia dan digantikan oleh Najib Tun Razak.²¹

2. Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia

Pada abad ke-9, bersamaan dengan masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara, Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Munculnya Islam di Malaysia berkat jasa para pedagang dari Arab melalui Malaka.²²

Sejak tahun 1957, saat awal Malaysia merdeka, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional dan diberikan selama 120 menit per minggunya. Tetapi pemerintah tidak melakukan penekanan terhadap ilmu pengetahuan agama Islam, sehingga pelajaran ini tidak mendapat perhatian serius dari siswa pada masa tersebut.²³

Tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual. Sebagaimana diterangkan oleh Joseph Chinyong Liow dalam bukunya berjudul *PIETY AND POLITICS Islamism in Contemporary Malaysia* mengatakan bahwa:

*By the early 1980s, Malaysian society was already in the throes of an Islamization process that was gaining momentum on the back of both international and domestic developments. According to prominent Malaysian activist Chandra Muzaffar, "Islamization is that process by which what are perceived as Islamic laws, values and practices are accorded greater significance in state, society and culture."*²⁴

²⁰Budi Haryanto, "Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia", *Adabiyah Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No 1 (September, 2015), 85.

²¹Ibid, 84.

²²Hidayat, *Studi Islam*, 33.

²³Andi Aslindah, "Pendidikan Islam Di Malaysia ", *Lentera Pendidikan*, VOL. 18 NO. 1 (Juni, 2015), 18.

²⁴Joseph Chinyong Liow, *Piety And Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*, (New York: Oxford University Press, 2009), 43.

Terjemahan versi Indonesia:

"Pada awal 1980-an, masyarakat Malaysia sudah dalam pergolakan proses Islamisasi yang mendapatkan momentum di belakang kedua perkembangan internasional dan domestik. Menurut aktivis Malaysia terkemuka Chandra Muzaffar, "Islamisasi adalah proses dimana apa yang dianggap sebagai hukum Islam, nilai-nilai dan praktik yang diberikan lebih besar signifikansi di negara, masyarakat dan budaya."

Pada awalnya pendidikan Islam berbentuk kelas mengaji al-Qur'an, yang merupakan pelajaran utama pada semua lapisan masyarakat saat itu walaupun tidak berbentuk lembaga formal. Pada peringkat awal, kelas pengajian al-Quran dilakukan di rumah guru yang mengajar al-Quran. Apabila bilangan pelajar-pelajar mulai bertambah, kelas al-Quran kemudiannya berpindah ke surau dan masjid.²⁵

Sebagaimana yang dikutip oleh Richard G. Kraince dalam karyanya *Reforming Islamic Education In Malaysia* mengatakan bahwa:

*The earliest form of Islamic education in the Malay Peninsula was Qur'anic instruction, conducted in mosques, prayer houses, and the homes of learned Muslims since the arrival of Islam in the region. Although this study is considered nonformal education today, Qur'anic instruction was the primary medium through which Malays attained basic literacy up until the establishment of the first formal schools on the Malay Peninsula in the early 1800s.*²⁶

Tahap selanjutnya, selain al-Quran yang menjadi pengajian dasar, pendidikan Islam terus berkembang menjadi pusat pengajian ilmu Fiqah, Tauhid, Tafsir, Sejarah, Tasawuf dan Falsafah Islam sebagai kurikulumnya.²⁷

Pendidikan di Malaysia pada dasarnya mengadopsi sistem dari negara Inggris sebab Malaysia merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal ini yang menyebabkan Malaysia maju di bidang pendidikan, di mana negara Inggris sangat memerhatikan pendidikan untuk negeri jajahannya. Ini berbeda dengan Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda.²⁸

Di Malaysia, pendidikan Islam memiliki berbagai jenis dan jenjang diantaranya adalah sekolah pondok, sekolah madrasah, dan sekolah agama Islam lain. Adapun jenis lembaga pendidikan umum seperti Sekolah Kebangsaan, Sekolah Kluster, Sekolah Jenis Kebangsaan, dan lain sebagainya. Jenjang pendidikannya yaitu Prapendidikan Dasar, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Pascapendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.²⁹

²⁵Mohd Roslan & Mohd Nor, "Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia", *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2011), 67.

²⁶Robert W. Hefner, *Making modern Muslims : the politics of Islamic education in Southeast Asia*, (United States of America: University of Hawai'i Press), 2009, 112.

Terjemahan versi Indonesia:

"Bentuk paling awal dari pendidikan Islam di Semenanjung Melayu adalah instruksi Alquran, dilakukan di masjid-masjid, rumah-rumah doa, dan rumah-rumah Muslim belajar sejak kedatangan Islam di wilayah tersebut. Meskipun penelitian ini adalah mengingat pendidikan nonformal hari ini, instruksi Alquran adalah media utama melalui mana orang Melayu mencapai keaksaraan dasar sampai pembentukan sekolah formal pertama di Semenanjung Melayu di awal 1800-an."

²⁷Roslan, *Sejarah*, 68.

²⁸Aslindah, *Pendidikan Islam Di Malaysia*, 18.

²⁹Ibid, 20.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan terutama di perguruan tinggi, Pemerintah Malaysia mempunyai perhatian yang besar. Beberapa Perguruan tinggi yang membuka program Islamic Studies adalah: Internasional Islamic University of Malaysia (IIUM), University of Malaya (UM), University Kebangsaan Malaysia (UKM), Univerisity Utara Malaysia (UUM), Univerisity Pendidikan Sultan Idris (UPSI), University Sains Malaysia (USM), dan Kolej University Islam Selangor (KUIS). University Malaysia (UM) adalah universitas tertua di Malaysia. Berdiri pada tanggal 8 Oktober 1948 ketika King Edward VII *College of Medicine dan Raffles College* bergabung menjadi University Malaysia di Singapura. Sedangkan University Kebangsaan Malaysia (UKM) adalah universitas yang didirikan setelah UM. Ia berdiri pada tanggal 18 Mei 1970 dan bertempat di Lembah Pantai Kuala Lumpur. Adapun *International Islamic University of Malaysia (IIUM)* yang biasa disebut University Islam Antarbangsa Malaysia (UIAM) merupakan hasil kerja sama antara kerajaan Malaysia dan *Organitation of the Islamic Conference (OIC)*. Ketiga institusi tersebut membuka fakultas atau akademi studi Islam dan menawarkan hampir semua program studi yang ada dalam studi Islam, baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3 seperti Fikih dan Usul Fikih, *Alquran dan Sunah Studies, Communication, English Literature and Linguistic*. Ketiga universitas tersebut menggunakan sistem semester dalam kegiatan belajar mengajar. Dosen-dosen yang mengajar adalah dosen-dosen lulusan universitas-universitas lokal Malaysia dan lulusan luar negeri, baik Timur Tengah maupun Barat.³⁰

3. Tujuan dan Kebijakan pemerintah Malaysia dalam pendidikan Islam

Pendidikan di Malaysia bertujuan mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini dimaksudkan agar dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.³¹

Beberapa kebijakan pendidikan Islam di Malaysia antara lain:

- ✓ Sejak merdeka pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia.
- ✓ Pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam ditempuh oleh Departemen Pendidikan.
- ✓ Pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan.

³⁰ Roslan, *Sejarah*, 19

³¹ Aslindah, *Pendidikan Islam Di Malaysia*, 24.

- ✓ Tahun 1983, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada pelajar nonmuslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan kepada para pelajar muslim.³²

Perbandingan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia

1. Beberapa kesamaan perkembangan pendidikan Islam antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:³³
 - a) Indonesia maupun Malaysia memiliki konsep yang sama bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai yang berdasarkan norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.
 - b) Masuknya Islam ke dua negara serumpun terjadi pada waktu yang bersamaan yang dibawa oleh para pedagang dari India Selatan. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia yang cukup sibuk, pertemuan beberapa budaya dan agama terjadi dan singgah di semenanjung Malaya dan Sumatera karena kepentingan perniagaan. Begitu pula masuknya Islam di dua wilayah itu karena persinggahan para pedagang dari Gujarat.
 - c) Awal pendidikan Islam bersamaan dengan masuknya Islam. Baik di Indonesia maupun Malaysia menandai awal pendidikan Islam dimulai ketika Islam masuk ke wilayah setempat.
 - d) Memiliki dualisme sistem pendidikan, pendidikan barat yang sekuler dan pendidikan bumi putera yang Islami. Di Malaysia, bangsa Melayu tidak menanggapi sistem pendidikan yang dikelola penjajah Inggris karena khawatir akan merusak akidah putra-putri mereka. Di Indonesia para santri dan kyai memandang sistem pendidikan yang diselenggarakan bangsa Belanda adalah representasi golongan kafir yang bertentangan dengan Islam. Maka muncul sentimen-sentimen anti penjajah terhadap sistem pendidikan Belanda. Pihak penjajah menyelenggarakan pendidikan di wilayah jajahan bertujuan untuk mempertahankan hegemoninya di tanah jajahan. Ketidaksetujuan terhadap sistem pendidikan barat di Indonesia dan Malaysia disemangati oleh dua alasan di atas.
 - e) Fase perkembangan dakwah dan pendidikan Islam mengalami hambatan oleh penguasa penjajah. Kaum penjajah selain menguasai kekayaan alam negeri jajahan juga bermaksud melakukan penyebaran agama yang mereka bawa (*mission zending*). Misi mereka berhadapan langsung dengan dakwah Islam yang sedang berkembang. Oleh sebab itu penguasa menjalankan strategi represifnya terhadap para pelaku dakwah Islam. Penjajah Belanda di Indonesia sangat rinci dalam mengawasi gerak dinamika gerakan-gerakan dakwah Islam dengan memetakan lapisan-lapisan sosial masyarakat pribumi non ningrat di kota dan desa-desa. Akibatnya pendidikan Islam pada masa penjajahan termarginalkan di wilayah desadesa.
 - f) Sama-sama mengalami periode pembaharuan pemikiran pendidikan Islam sebagai pengaruh pembaharuan yang terjadi di Mesir pada awal abad kedua puluh. Di Malaysia ditandai dengan berdirinya Madrasah di Bukit Mertajam, Madrasah Iqbal dan Al-Hadi. Di Indonesia berdiri

³² Ibid , 23.

³³ Haryanto, *Perbandingan Pendidikan Islam*, 91.

sekolah-sekolah yang menggabungkan sistem klasikal dan pesantren melalui organisasi masa keagamaan modernis seperti, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan Persis.

- g) Adanya upaya menghapus dualisme dalam sistem pendidikan yang memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Konsep pendidikan yang dianggap ideal bagi kedua negara adalah mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam satu sistem pendidikan yang terpadu, tidak ada pemisahan pendidikan umum yang sekuler dengan pendidikan agama Islam yang terisolasi dan terbelakang. Upaya-upaya itu dilakukan dengan menyusun peraturan-peraturan baru yang mengakomodasikan terintegrasinya dua sistem pendidikan tersebut.
- h) Pemerintah melakukan penyempunaan sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional masing-masing negara. Kedua negara menilai pendidikan Islam sangat penting karena merupakan agama yang dianut mayoritas, bahkan di Malaysia sebagai agama resmi negara. Maka lulusan dari pendidikan Islam harus menjadi pilar utama penopang kemajuan bangsa, oleh sebab itu diperlukan sistem pendidikan Islam yang berkualitas.

2. Beberapa perbedaan perkembangan pendidikan Islam antara Indonesia dan Malaysia sebagai berikut:³⁴

- a) Di Indonesia segala macam urusan agama ditangani oleh Kementerian Agama yang membawahi seluruh agama yang ada di Indonesia. Di Malaysia, urusan agama Islam langsung di bawah pengawasan Yang Dipertuan Agong, dalam hal ini ditunjuk seorang pejabat Urusan Hal Ehwal Agama Islam sebagai pelaksananya. Hal ini merupakan suatu keistimewaan bagi Agama Islam, sebab urusan keagamaan Islam merupakan urusan negara. Oleh sebab itu negara sangat ketat mengawal segala kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai Islam. Tetapi sebaliknya, agama-agama selain Islam bukan urusan negara. Di Indonesia semua agama memiliki kedudukan yang sama. Hak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut warga diatur dan dilindungi oleh UUD. Kecuali karena sebab mayoritas, tidak ada agama yang memiliki kedudukan istimewa di Indonesia.
- b) Perhatian yang sangat serius dari pemerintah kebangsaan terhadap output lulusan sekolah dalam bidang pengetahuan dan kompetensi agamanya. Sehingga menyelenggarakan program j-QAF, suatu program untuk menjembatani kemampuan meng-khatam al-Qur'an bagi calon lulusan sekolah rendah. Program ini mulai diterapkan tahun 2005. Program **j-QAF** (singkatan: Jawi, al-Quran, Arab, Fardu Ain) merupakan satu pendekatan pembelajaran agama di sekolah di Malaysia. Idea pelaksanaan program j-QAF yang dilontarkan Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 2004 adalah untuk memperkasa sistem pengajaran pendidikan Islam di sekolah.

³⁴Ibid, 93.

Apa yang diharapkan melalui pelaksanaan program j-QAF ini ialah murid-murid dapat khatam al-Quran pada tahun enam mereka di sekolah rendah, malah lebih awal daripada itu andai semua pihak bekerja keras dan bekerjasama merealisasikannya. Selain itu, diharapkan murid-murid dapat berkomunikasi dalam Bahasa Arab terutama aspek komunikasi mudah seharian.

Pengajaran pemulihan tulisan Jawi dilaksanakan dengan inovasi pembelajaran menggunakan pelbagai kaedah seperti permainan, lagu, multimedia dan seumpamanya. Inovasi ini memberikan suntikan semangat untuk anak-anak mempelajari jawi dengan lebih intensif dan menarik.

- c) Dengan wilayah yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia, pendidikan Islam menunjukkan corak yang beragam sesuai dengan karakter kedaerahan setempat. Corak pendidikan Islam Indonesia seperti pondok pesantren di Jawa, Dayah di Aceh, dan Surau di Minangkabau misalnya, menampilkan kekhasan yang unik yang ikut mewarnai dinamika perkembangannya. Sistem pendidikan Islam tradisional sangat diwarnai oleh corak-corak budaya kedaerahan.

3. Relasi Negara, Ideologi, Masyarakat Dan Pendidikan Islam

Dari beberapa persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, maka penulis mengambil satu pembahasan utama yakni adanya tiga komponen penting yang mempengaruhi pendidikan Islam yakni negara, ideologi dan masyarakat.

Negara memiliki wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan yang melindungi potensi manusia dan alam serta pembedayaannya. Sedangkan ideologi negara adalah landasan negara yang telah disepakati untuk menghantarkan bangsa menuju cita-cita seluruh rakyatnya. Pendidikan adalah proses kulturisasi agar lebih maju, dan proses pengembangan potensi manusia sesuai bakat dan minat untuk memperkuat dukungan terhadap penggalan sumber daya alam menuju terciptanya masyarakat yang dicita-citakan. Sementara itu masyarakat merupakan kelompok sosial yang selalu dan ingin berinteraksi dengan masyarakat lainnya.³⁵

Untuk kepentingan bersosialisasi, masyarakat sudah tentu memerlukan aturan-aturan sosial dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Salah satu sistem sosial yang dimaksud adalah sistem politik. Politik tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat karena pada dasarnya politik itu lahir dari tengah-tengah masyarakat dan berguna bagi masyarakat terutama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan-kebijakan pendidikan Islam yang diatur oleh pemerintah merupakan bentuk implementasi dari politik Pendidikan Islam. Bentuk dari kebijakan pendidikan Islam akan terkait dengan ideologi yang dianut suatu negara. Ideologi yang berbeda maka akan mempengaruhi bagaimana politik pendidikan Islam yang diselenggarakan. Malaysia yang bersifat monarkhi

³⁵ Kasful Anwar Us, "Dimensi Hubungan Negara, Politik Dan Pendidikan", *TADIB*, Vol. XV. No. 02, (Nopember, 2010), 297.

konstitusional dan Indonesia yang republik presidensial memiliki norma-norma yang berbeda dalam menempatkan alat kelengkapan negara.

Di Indonesia segala macam urusan agama ditangani oleh Kementerian Agama yang membawahi seluruh agama yang ada di Indonesia. Di Malaysia, urusan agama Islam langsung di bawah pengawasan Yang Dipertuan Agong, dalam hal ini ditunjuk seorang pejabat Urusan Hal Ehwal Agama Islam sebagai pelaksananya. Hal ini merupakan suatu keistimewaan bagi Agama Islam, sebab urusan keagamaan Islam merupakan urusan negara. Oleh sebab itu negara sangat ketat mengawal segala kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai Islam. Tetapi sebaliknya, agama-agama selain Islam bukan urusan negara. Di Indonesia semua agama memiliki kedudukan yang sama. Hak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut warga diatur dan dilindungi oleh UUD. Kecuali karena sebab mayoritas, tidak ada agama yang memiliki kedudukan istimewa di Indonesia.

Kondisi masyarakat suatu negara yang mempengaruhi ideologi yang dianut akan menentukan arah kebijakan pendidikan Islam atau politik pendidikan Islam. Ini menunjukkan bahwa antara negara, ideologi, masyarakat dan pendidikan Islam merupakan suatu sinergi yang dinamis, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun peradaban yang dicita-citakan serta mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan Islam yakni membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlaq mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, berkembangnya peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan menyerasikannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

PENUTUP

Relasi antara antara negara, ideologi, masyarakat dan pendidikan Islam merupakan suatu sinergi yang dinamis, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun peradaban yang dicita-citakan serta mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan Islam yakni membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlaq mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama, berkembangnya peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dengan menyerasikannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dari beberapa persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, maka penulis mengambil satu kesimpulan bahwa adanya relasi antara antara negara, ideologi, masyarakat dan pendidikan Islam yang dapat terkait secara sinergi yang dinamis, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Us, Kasful, "Dimensi Hubungan Negara, Politik Dan Pendidikan", *TA'DIB*, Vol. XV. No. 02, Nopember, 2010
- Arifin, M., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rosdakarya, 2000, 33.
- Aslindah, Andi , "Pendidikan Islam Di Malaysia ", *Lentera Pendidikan*, VOL. 18 NO. 1 , Juni, 2015.
- Daulay,Haidar Putra *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Haryanto,Budi, "Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia", *Adabiyah Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, No 1 September, 2015.
- Hefner, Robert W., *Making modern Muslims : the politics of Islamic education in Southeast Asia*, (United States of America: University of Hawai'i Press), 2009.
- Hidayat,Asep Ahmad, dkk, *Studi Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Liow, Joseph Chinyong, *Piety And Politics: Islamism in Contemporary Malaysia*, (New York: Oxford University Press, 2009
- Mahfud,Choirul,*Politik Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Mutohar, Prim Masrokan, *Manajemen Mutu Sekolah*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2013.
- Nata, Abudin, *Pemikiran Pendidikan Islam & Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Roslan, Mohd & Mohd Nor, Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia, *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2011.
- Solichin, Mujianto, M. Kholid Thohiri, dkk, *Politik Pendidikan Islam*, Malang: Media Sutra A,tiga, 2016.
- Sutrisno, Muhyidin Albarobis, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Suharto,Toto,*Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Tan,Charlene Hwee Phio, *Education and Indoctrination The Case in Indonesia*, New York: Routledge, 2011.